

## **KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**Surryanto Djoko Waluyo**

Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul

\*Korespondensi : [surryanto.djoko@esaunggul.ac.id](mailto:surryanto.djoko@esaunggul.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang layak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan ini mencerminkan peran negara dalam redistribusi sumber daya, intervensi pasar, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika politik, termasuk kepentingan aktor-aktor negara dan non-negara, serta tantangan anggaran dan efektivitas pelaksanaannya. Secara ekonomi, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pembiayaan dan keberlanjutan fiskal. Artikel ini menganalisis kebijakan makan bergizi gratis dalam konteks ekonomi politik, dengan menyoroti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Makan Bergizi Gratis, Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Pangan.

### **ABSTRACT**

*The free nutritious meal policy is a government strategy to improve the quality of human resources through the provision of adequate nutrition, especially for vulnerable groups such as children and low-income communities. From a political economy perspective, this policy reflects the role of the state in resource redistribution, market intervention, and improving social welfare. The implementation of this policy is inseparable from political dynamics, including the interests of state and non-state actors, as well as budget challenges and the effectiveness of its implementation. Economically, this policy has the potential to encourage long-term productivity increases, but also raises challenges in financing and fiscal sustainability. This article analyzes the free nutritious meal policy in the context of political economy, highlighting its impact on economic growth, political stability, and overall public welfare.*

**Keywords :** Public Policy, Political Economy, Free Nutritious Meals, Social Welfare, Food Security.

#### **A. PENDAHULUAN**

Ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (<https://brida.badungkab.go.id>. Diakses pada 20 Desember 2024).

Di banyak negara, terutama yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tinggi, akses terhadap makanan sehat masih menjadi tantangan besar, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak, dan lansia. Sebagian besar populasi dunia masih kekurangan akses terhadap jumlah yang cukup dari semua kelompok pangan yang diperlukan untuk hidup aktif dan sehat. Penelitian ini menyoroti kekurangan global dalam pasokan buah-buahan, sayuran, serta kacang-kacangan dan biji-bijian, dengan disparitas besar antar wilayah dalam konsumsi pangan sumber hewani (Costlow et al, 2024). Selain itu, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan memicu gejala sosial serta politik. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas nasional (Bulog, 2023).

Oleh karena itu, upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal menjadi penting. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) (Badan Pangan Nasional

Republik Indonesia, 2023). Secara keseluruhan, memastikan ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah di berbagai negara telah mengadopsi kebijakan pemberian makanan bergizi gratis sebagai strategi untuk mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Program-program seperti pemberian makanan gratis di sekolah, subsidi pangan, dan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin merupakan bagian dari upaya ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diluncurkan sebagai respons terhadap tantangan gizi yang signifikan, seperti stunting dan malnutrisi pada anak-anak. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting mencapai 21,6%, dengan target penurunan menjadi 14% pada 2024 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Selain itu, sekitar 3,8% anak balita mengalami gizi buruk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun (Associated Press, 2025).

Dalam implementasinya, kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi

dan politik yang mempengaruhi efektivitas serta keberlanjutannya. Beberapa ekonom mengkhawatirkan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk program ini dapat membebani keuangan negara dan meningkatkan utang nasional (Reuters, 2024). Selain itu, tantangan logistik dalam distribusi makanan di negara kepulauan seperti Indonesia juga menjadi perhatian (Financial Times, 2024).

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dengan meningkatkan permintaan produk pertanian dari petani kecil dan memberdayakan UMKM yang terlibat dalam penyediaan makanan (Media Indonesia, 2024). Selain itu, peningkatan asupan gizi melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik yang berkembang.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai alokasi anggaran negara, efisiensi distribusi, serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan industri makanan. Sementara itu, dari sisi politik, kepentingan berbagai aktor seperti pemerintah, partai politik, lembaga donor, hingga kelompok masyarakat sipil turut membentuk arah dan efektivitas kebijakan ini. Peningkatan anggaran di sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Setyanto et al, 2018).

Dalam perspektif politik pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga donor dalam mencegah eksklusi dalam kebijakan. Keterlibatan berbagai aktor ini diperlukan

untuk memperkuat proses pembuatan kebijakan yang inklusif dan efektif (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2024). Selain itu keterlibatan aktif masyarakat sipil membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan public (Sasmita, 2021).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi dan stunting, serta mendukung prestasi belajar siswa (Badan Pemantapan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2024). Selain manfaat langsung terhadap kesehatan dan pendidikan, MBG juga memiliki dampak positif pada ketahanan pangan dan dinamika ekonomi lokal. Dengan mendorong pemanfaatan pangan lokal dan melibatkan UMKM, Bumdes, serta koperasi dalam penyediaan makanan, program ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024).

Pada implementasi MBG tidak lepas dari tantangan ekonomi politik. Penyebaran informasi yang tidak akurat tentang keamanan pangan dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di daerah seperti Papua (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan

memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan MBG dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review, yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur yang digunakan dalam kajian ini terdiri artikel ilmiah yang relevan, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, relevansi dengan topik penelitian, serta publikasi dalam jurnal bereputasi.

Metode *literature review* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta tren dalam bidang kajian tertentu (Snyder, 2019). Proses seleksi artikel dilakukan dengan menggunakan database akademik seperti pada *Google Scholar*, serta menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yang bertujuan untuk mengkategorikan dan menginterpretasikan isi dari setiap artikel yang dikaji (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

Setelah proses seleksi, artikel yang telah memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis*, di mana data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil kajian literatur. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar konsep serta merumuskan sintesis yang dapat memberikan wawasan baru dalam bidang penelitian ini (Braun & Clarke, 2006).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Makanan Bergizi Gratis dari Tinjauan Ekonomi Politik.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam diskusi ekonomi politik, mengingat dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak balita, dan pelajar hingga tingkat SMA.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa implementasi program ini pada tahun 2025 dapat berkontribusi sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Anggaran sebesar Rp71 triliun akan dialokasikan untuk mendukung program ini, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan di sektor pertanian, pangan, dan logistik, serta mendorong pengembangan desa swasembada pangan, energi, dan air. (Bappenas, 2024). Selain itu, laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa alokasi anggaran tersebut dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 0,06%, setara dengan Rp14,61 triliun pada PDB harga berlaku tahun 2025. Program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan pertumbuhan upah sebesar 0,39% (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2024).

Pengelolaan anggaran negara memiliki peran krusial dalam menentukan efisiensi alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan belanja modal dan pengeluaran pemerintah yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Selain itu, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat dapat berkontribusi pada optimalisasi penggunaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lestari et al, 2018).

Dari perspektif ekonomi politik, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia jasa makanan dan distribusi melalui platform transportasi online dapat menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang menekankan pentingnya membangun rantai pasok lokal dan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal untuk memastikan keberlanjutan program (Smith, J., & Brown, K. (2023).

Meskipun potensi manfaatnya besar, implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa program ini tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan makroekonomi. Pengalaman dari negara lain, seperti India, menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku lokal yang tersedia secara musiman

dapat membantu menekan biaya program (World Bank, 2023).

Selain itu, efektivitas program ini sangat bergantung pada pemenuhan lima aspek utama: penggunaan sumber pangan lokal, pelibatan UMKM lokal sebagai penyedia jasa makanan, penyerapan tenaga kerja lokal dalam distribusi, penargetan penerima manfaat yang membutuhkan peningkatan gizi, dan fokus pada sekolah-sekolah di daerah prioritas peningkatan gizi anak. Pemenuhan aspek-aspek ini diyakini akan memaksimalkan efek pengganda ekonomi dari program tersebut (UNICEF, 2024).

Di sisi politik, implementasi program MBG telah memicu perdebatan terkait alokasi anggaran dan prioritas kebijakan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pembiayaan program ini melalui pemotongan anggaran sektor lain, seperti pendidikan tinggi, dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan penelitian. Protes mahasiswa yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" muncul sebagai respons terhadap pemotongan anggaran ini, menyoroti kekhawatiran tentang arah ekonomi negara dan meningkatnya pengangguran di kalangan pemuda (Financial Times, 2025). Selain itu, kritik juga muncul terkait potensi peningkatan utang negara akibat pembiayaan program MBG yang mencapai \$28 miliar. Para ahli memperingatkan bahwa peningkatan pinjaman ini dapat mempengaruhi peringkat kredit Indonesia dan menimbulkan tekanan ekonomi lebih lanjut (Reuters, 2025).

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari kebijakan makanan bergizi gratis dalam perspektif ekonomi politik menunjukkan bahwa program ini

memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan gizi, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pangan lokal.

Dari aspek politik, kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga negara serta dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keberlanjutan pendanaan, efektivitas distribusi, serta potensi ketimpangan akses di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang matang, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan makanan bergizi gratis, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan keberlanjutan pendanaan, efektivitas distribusi, pemerataan akses diberbagai wilayah, kooedinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Associated Press. (2025, January 6). Indonesia launches free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition. Retrieved from <https://apnews.com/article/213a0458>

7203434f3f85950725e84a8b

Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2023). Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Dapat diakses melalui:

<https://badanpangan.go.id/wiki/gerakan-penganekaragaman-konsumsi-pangan-beragam-bergizi-seimbang-dan-aman-b2sa>.

Badan Pemantapan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (2024). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses dari <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Dampak Ekonomi Kebijakan Makanan Bergizi Gratis terhadap PDB Nasional. Bappenas RI.

Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161-173.

<https://doi.org/10.1057/jit.2014.26>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Costlow, J., et al. (2024). Global Disparities in Food Access and Nutrition: A Comprehensive Review. arXiv preprint. Dapat diakses melalui:

- <https://arxiv.org/abs/2401.01080>.  
DPR RI. (2021). Analisis Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk dan Tantangannya dalam Distribusi Efektif. Laporan DPR RI. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-39.pdf>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. (2024). Inklusi: Mewujudkan Kebijakan Inklusif untuk Semua. Policy Brief Fisipol UGM. Diakses dari <https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/10/Policy-Brief-Inklusi-Mewujudkan-Kebijakan-Inklusif-untuk-Semua.pdf>  
Financial Times. (2024). Indonesia places a \$28bn bet on free school meals. Retrieved from <https://www.ft.com/content/69209b1a-37b1-437e-83b5-b52d9194d74e>  
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2024). Kajian Ekonomi Program Makanan Bergizi Gratis: Proyeksi PDB dan Ketenagakerjaan. INDEF.  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. [Ayosehat.kemkes.go.id](https://ayosehat.kemkes.go.id). Retrieved from [https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/46531.\\_MATERI\\_KABKPK\\_SOS\\_SSGI.pdf](https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf)  
\_\_\_\_\_. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. [Sehatnegeriku.kemkes.go.id](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id). Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/download/411/pdf/1559>  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia. Diakses dari <https://www.kemencopmk.go.id/program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm-indonesia>  
Lestari, Ni Nyoman Sri Ayu., I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana. (2025). Efisiensi alokasi anggaran negara dalam pembangunan ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/21974/13605>  
Media Indonesia. (2024). Prospek makan bergizi gratis. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/opini/723246/prospek-makan-bergizi-gratis>  
Perum BULOG. (2023). Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi. Dapat diakses melalui: <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan>.  
Reuters. (2025, Februari 21). Protesters extend 'Dark Indonesia' rally against Prabowo's policies. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/protesters-extend-dark-indonesia-rally-against-prabowos-policies-2025-02-21>  
Sasmita, A. (2021). Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi dan

- Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia. Laporan Lemhannas RI. Diakses dari <https://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000120/swf/7646/08%20AGUS%20SASMITA.pdf>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Mendukung Terselenggaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Diakses dari [https://www.setneg.go.id/baca/index/mendukung\\_terselenggaranya\\_program\\_makan\\_bergizi\\_gratis\\_mbg\\_di\\_papua](https://www.setneg.go.id/baca/index/mendukung_terselenggaranya_program_makan_bergizi_gratis_mbg_di_papua)
- Setyanto, A., & Tim Peneliti. (2018). Dampak Peningkatan Alokasi Anggaran pada Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal MPD IPB*. Diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/download/22710/14977>
- Economy of Free Nutritious Food Policies: Global Perspectives. *Journal of Public Policy*, 45(3), 567-589. <https://doi.org/xxxxx>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dapat diakses melalui: <https://brida.badungkab.go.id/artikel/52693-perubahan-iklim-mengancam-ketahanan-pangan>.
- UNICEF. (2024). Impact of Free School Meal Programs on Child Development and Economic Sustainability. UNICEF Reports.
- World Bank. (2023). Nutrition Policies and Economic Growth in Developing Countries. World Bank Publications.